

TRANSFORMASI KEPEMIMPINAN DESA: ANALISIS GAYA KEPALA DESA KOLAM DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN

Arya Pratama Mengulahi Lumban Batu¹, Hiskia H. Pardosi², Roy Okto Hutagalung³, Rasyha Pratama Rangkuti⁴

aryapratamaqu@gmail.com¹, hiskiapardosi2@gmail.com², royoktohutagalung321@gmail.com³, rasyhapratama314@gmail.com⁴

Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Kepala desa memegang peranan penting dalam menggerakkan pembangunan desa, khususnya dalam aspek kepemimpinan, pengelolaan keuangan, pembangunan infrastruktur, serta pelayanan publik. Artikel ini menganalisis gaya kepemimpinan Kepala Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Metode penulisan yang digunakan adalah studi deskriptif-analitis dengan pendekatan studi kasus berbasis literatur dan observasi kontekstual. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepala desa cenderung menerapkan gaya kepemimpinan demokratis berbasis musyawarah, namun dalam kondisi tertentu menggunakan gaya otoriter untuk mempercepat pengambilan keputusan. Permasalahan utama yang ditemukan meliputi konflik antarwarga, rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan dalam pengelolaan keuangan desa, keterlambatan pembangunan infrastruktur, serta lambatnya pelayanan publik. Solusi yang ditawarkan mencakup pelatihan kepemimpinan, digitalisasi administrasi, pengawasan keuangan berbasis partisipatif, serta inovasi pelayanan publik. Artikel ini merekomendasikan penerapan model kepemimpinan partisipatif berbasis kearifan lokal untuk memperkuat kemandirian desa dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kepemimpinan Desa, Gaya Kepemimpinan, Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat, Pelayanan Publik.

ABSTRACT

The village head plays an important role in driving village development, particularly in terms of leadership, financial management, infrastructure development, and public services. This article analyzes the leadership style of the Village Head of Kolam, Percut Sei Tuan District, in facing various development challenges. The writing method used is a descriptive-analytical study with a case study approach based on literature and contextual observation. The results of the analysis show that the village head tends to apply a democratic leadership style based on deliberation, but in certain conditions uses an authoritarian style to speed up decision-making. The main problems found include conflicts between residents, low community participation, limitations in village financial management, delays in infrastructure development, and slow public services. The solutions offered include leadership training, administrative digitization, participatory financial supervision, and public service innovation. This article recommends the application of a participatory leadership model based on local wisdom to strengthen village independence and encourage sustainable development.

Keywords: Village Leadership, Leadership Style, Village Development, Community Participation, Public Service.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan desa merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan daerah, karena kepala desa berperan sebagai penggerak, pengarah, dan pengambil keputusan strategis. Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, menjadi salah satu contoh desa yang sedang berupaya meningkatkan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala mulai dari konflik sosial,

pengelolaan keuangan, hingga keterlambatan pembangunan infrastruktur.

Artikel ini berupaya mengkaji gaya kepemimpinan Kepala Desa Kolam dalam menghadapi tantangan tersebut. Analisis difokuskan pada bagaimana kepala desa menyeimbangkan antara gaya kepemimpinan demokratis dan otoriter dalam konteks pembangunan desa, serta bagaimana solusi strategis dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan desa. Kepemimpinan merupakan cermin bagaimana organisasi dijalankan, sehingga di dalam organisasi tersebut nampak adanya keterlibatan menyeluruh orang-orang yang menjalankan tugas-tugas, melaksanakan metode, pola serta sistem dan kebijaksanaan tertentu sehingga mampu

menjalankan kewajibannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam kenyataannya setiap pemimpin sangat besar peranannya terhadap

anggota organisasi, yang terlihat dalam gaya perilaku pada waktu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan kata lain kepemimpinan yang efektif sangat berperan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu setiap pemimpin perlu memiliki aspek-aspek kepribadian yang dapat menunjang usahanya mewujudkan hubungan efektif dengan para bawahan atau anggota organisasi. Kepala Desa adalah pemimpin yang dipilih secara demokrasi maupun secara tradisional oleh warga yang mana ia adalah seorang wakil perpanjangan tangan dari masyarakat untuk dapat mengatur, menjaga dan memotivasi warganya di desa, sehingga kepemimpinan Kepala Desa sangatlah berpengaruh terhadap maju mundurnya dan berkembang atau tidak berkembangnya suatu desa. Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan jumlah penduduk. Kemudian dengan hadirnya prinsip desentralisasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah guna untuk mengatur urusan yang ada di daerah. Dengan adanya desentralisasi di negara ini harapannya dapat lebih mendekatkan masyarakat kepada proses pembuatan keputusan, akan tetapi sampai saat ini tidak semua masyarakat dapat memberikan pengaruh nyata akan adanya perubahan besar dalam pembuatan kebijakan partisipatif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pembangunan desa merupakan model partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan yang secara bersama-sama masyarakat musyawarah, mufakat, dan gotong royong guna menuju kesejahteraan rakyat dan juga merupakan cara hidup masyarakat yang sudah membudaya di wilayah Indonesia. Untuk suksesnya

pelaksanaan pembangunan di desa, sangat tergantung pada usaha mendinamiskan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan adanya suatu kebijakan yang mampu memobilisir seluruh kekuatan dan potensi sumber daya yang tersedia di desa. Jadi salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan pembangunan tersebut adalah kepemimpinan kepala desa. Dalam menghadapi era globalisasi peranan seorang pemimpin menjadi permasalahan yang rumit dimana masyarakat menuntut adanya peningkatan kesejahteraan hidup dan peningkatan sumber daya manusia khususnya dalam bidang pendidikan. Untuk mengantisipasi hal ini, maka Kepala Desa sebagai kepala Wilayah (desa) bertanggung jawab dalam kesuksesan pelaksanaan pembangunan sehingga harapan-harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan meningkatkan kualitas pembangunan dapat tercapai secara maksimal. Oleh karena itu didalam membangun masyarakat desa terutama dalam bidang sosial ekonomi masyarakat dibutuhkan seorang pemimpin, dalam hal ini adalah Kepala desa yang diharapkan berfungsi sebagai sumber inovasi, pembina, mengarahkan dan berfungsi sebagai komunikator untuk menyampaikan ide atau gagasan-gagasan kepada masyarakat desa, dalam rangka meningkatkan inisiatif dan kreatifitas masyarakat dalam mengolah,

memelihara dan memanfaatkan sumber – sumber yang

ada disekitarnya, untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik. Dalam proses pembangunan disamping mengejar pencapaian dalam bentuk fisik, juga mengubah sikap mental dan pola pikir masyarakat agar lebih maju, kreatif dan dinamis. Hal ini tidak mungkin tercapai apabila tidak disertai dengan sikap keterbukaan masyarakat untuk melaksanakan ide – ide dan gagasan dari pembangunan disertai peran serta masyarakat. Dalam proses mewujudkan partisipasi masyarakat, kepala desa juga harus berperan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap program yang dilakukan oleh pemerintah desa dan mampu mengembangkan kebijakan strategis yang melibatkan masyarakat. Masyarakat bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan program desa dan tercapainya tujuan pembangunan.

METODOLOGI

Berdasarkan topik yang diangkat, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengandalkan model matematis, statistik, maupun komputasi, melainkan berfokus pada deskripsi fenomena yang terjadi di lapangan. Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara objektif dengan tetap mempertahankan konteks sosial masyarakat desa, serta tidak dipengaruhi oleh pendapat peneliti semata.

Proses penelitian dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun asumsi dasar dan kerangka berpikir mengenai kepemimpinan desa, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Desa Kolam, serta wawancara dengan masyarakat, perangkat

desa, dan Kepala Desa Kolam. Data yang terkumpul kemudian disusun, dianalisis secara deskriptif, dan ditarik kesimpulan untuk menggambarkan secara menyeluruh praktik kepemimpinan serta tantangan yang dihadapi dalam mengelola pemerintahan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan di Desa Kolam memperlihatkan dinamika yang kompleks, dipengaruhi oleh heterogenitas masyarakat yang terdiri atas berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Kepala desa dituntut tidak hanya sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai figur yang mampu menjaga keharmonisan sosial, menyelesaikan konflik, serta memfasilitasi pembangunan desa. Tantangan yang dihadapi cukup beragam, mulai dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, konflik antarwarga, hingga permasalahan birokrasi. Kondisi ini menegaskan bahwa kepemimpinan desa tidak dapat dijalankan dengan satu gaya kepemimpinan tunggal, melainkan memerlukan fleksibilitas dan adaptasi sesuai dengan situasi yang dihadapi.

Gaya kepemimpinan demokratis berbasis musyawarah telah menjadi praktik umum di Desa Kolam. Musyawarah dianggap mampu menciptakan ruang keterbukaan, di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan turut serta dalam pengambilan keputusan. Namun, mekanisme demokratis ini tidak selalu berjalan efektif, khususnya ketika desa membutuhkan keputusan cepat dalam keadaan mendesak. Dalam kondisi demikian, kepala desa terkadang menerapkan gaya otoriter demi menjaga stabilitas dan kelancaran program. Meskipun langkah ini kadang diperlukan, penggunaan gaya otoriter yang berlebihan

dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, menurunkan kepercayaan, serta menciptakan persepsi sewenang-wenang.

Permasalahan konflik antarwarga merupakan salah satu tantangan nyata yang dihadapi. Konflik dapat muncul karena perbedaan kepentingan dalam pembagian lahan,

distribusi bantuan, hingga prioritas pembangunan. Jika konflik tidak dikelola dengan baik, maka dapat berujung pada polarisasi sosial yang menghambat pembangunan desa. Kepala desa dituntut memiliki kemampuan mediasi, empati, serta keterampilan komunikasi yang baik agar dapat menjadi penengah yang adil. Forum musyawarah desa yang dilaksanakan secara rutin bisa menjadi ruang strategis untuk menyalurkan perbedaan pendapat sekaligus memperkuat kohesi sosial masyarakat.

Selain persoalan sosial, pengelolaan keuangan desa menjadi isu sentral yang tidak kalah penting. Dana desa yang cukup besar memerlukan sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kepala Desa Kolam telah berupaya melibatkan masyarakat dalam perencanaan keuangan melalui forum musyawarah. Namun, keterbatasan kemampuan perangkat desa dalam membuat laporan keuangan yang sesuai prosedur masih menjadi hambatan. Hal ini memperlihatkan bahwa aspek kapasitas sumber daya manusia di tingkat aparat desa berperan signifikan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.

Pemanfaatan teknologi menjadi jawaban atas berbagai kelemahan tersebut. Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sangat potensial untuk diterapkan karena dapat membantu perangkat desa melakukan pencatatan, perencanaan, hingga pelaporan dana desa dengan lebih sistematis. Sistem ini juga memudahkan proses audit, sehingga setiap

penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Lebih jauh, publikasi laporan keuangan secara berkala melalui papan pengumuman desa, media sosial resmi, atau website desa akan memperkuat pengawasan publik. Transparansi ini akan membangun kepercayaan masyarakat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu fokus utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kolam. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan masalah berupa keterlambatan proyek, kualitas pekerjaan yang rendah, serta kurangnya kesesuaian antara perencanaan dan hasil akhir pembangunan. Permasalahan ini timbul karena lemahnya sistem perencanaan teknis, kurangnya pengawasan, serta keterbatasan tenaga ahli di tingkat desa. Ketidakselarasan antara aspirasi masyarakat dan realisasi pembangunan dapat menimbulkan kekecewaan, bahkan memicu konflik baru di tengah masyarakat.

Solusi yang dapat ditempuh adalah memperkuat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) agar lebih inklusif dan terarah. Keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta tenaga ahli sangat penting untuk menjamin bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya aspiratif, tetapi juga realistis dan sesuai standar teknis. Kontrak kerja dengan pihak ketiga yang dilengkapi dengan sanksi tegas juga perlu ditegakkan agar pelaksanaan proyek berjalan tepat waktu dan sesuai kualitas. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur desa dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pelayanan publik adalah aspek lain yang sangat menentukan kualitas kepemimpinan desa. Salah satu keluhan utama masyarakat adalah proses

birokrasi yang lambat, berbelit-belit, serta belum merata menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan dan mengurangi legitimasi pemerintahan desa. Padahal, pelayanan publik yang baik merupakan bentuk nyata dari hadirnya pemerintah di tengah masyarakat. Apabila pelayanan publik tidak berjalan optimal, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan menurun drastis. Digitalisasi pelayanan publik menjadi alternatif yang paling menjanjikan. Penerapan aplikasi layanan desa online akan memungkinkan masyarakat mengurus administrasi

dengan cepat tanpa harus hadir secara langsung di kantor desa. Selain itu, layanan keliling (mobile service) dapat memperluas jangkauan pelayanan, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil. Aparatur desa juga harus dibekali dengan pelatihan pelayanan prima agar dapat memberikan layanan yang ramah, cepat, dan profesional. Penetapan standar pelayanan minimal (SPM) dengan batas waktu yang jelas untuk setiap jenis layanan akan memberikan kepastian hukum dan administratif bagi masyarakat. Secara keseluruhan, kepemimpinan Kepala Desa Kolam berada pada posisi strategis untuk mengoptimalkan pembangunan desa. Gaya kepemimpinan demokratis perlu dijadikan landasan utama agar masyarakat merasa dihargai dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sementara gaya otoriter dapat digunakan secara terbatas hanya dalam kondisi mendesak. Integrasi teknologi digital dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik akan mempercepat proses birokrasi serta meningkatkan akuntabilitas. Dengan penguatan kapasitas aparatur desa, perencanaan pembangunan yang matang, serta keterlibatan masyarakat yang lebih aktif, Desa Kolam berpotensi mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kepemimpinan Kepala Desa Kolam menunjukkan bahwa gaya demokratis berbasis musyawarah menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan, sementara gaya otoriter digunakan secara terbatas pada situasi mendesak. Permasalahan yang dihadapi meliputi konflik antarwarga, pengelolaan keuangan yang belum optimal, keterlambatan pembangunan infrastruktur, serta pelayanan publik yang lambat. Solusi strategis yang dapat dilakukan adalah peningkatan kapasitas aparatur desa, penerapan teknologi digital dalam keuangan dan pelayanan publik, serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam setiap proses pembangunan. Dengan langkah-langkah tersebut, Desa Kolam berpotensi mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Lagantondo, H. (2019). Gaya kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tampemadoro Kecamatan Lage Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 12(1).
- Lahada, G. (2018). Kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Malei Lage Kecamatan Lage Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 11(1).
- Lamangida, T., Akbar, M. F., & Hasan, H. (2017). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(1), 68-78.
- Rauf, R., & Maulidiah, S. (2015). *Pemerintahan desa*. Zanafra Publishing.
- Rismayana, B. (2021). Kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Mendik Makmur Kecamatan Longkali Kabupaten Paser. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 23-36.
- Rudy. (2022). *Buku ajar Hukum pemerintah desa*. AURA CV. Anugrah Utama Raharja.
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA*, 5(1), 44-54.
- Syafitri, Y., Dema, H., & Syarifuddin, H. (2024). Analisis gaya kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan disiplin kerja: Kasus Desa Taulan menggunakan Nvivo. *Pamarenda: Public Administration and Government Journal*, 4(1), 29-41.
- Tahir, M. I. (2022). Keefektifan organisasi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik. *Epigraf Komunikata Prima*.
- Wendar, N., Daswat, & Tamher, F. W. (2021). Gaya kepemimpinan kepala desa di Kantor Desa Moahino Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali. *Cenderawasih: Jurnal Administrasi*

dan Manajemen Publik, 1(1).